

DPRD Salatiga Ingatkan Eksekutif

SALATIGA (KR) - Wakil Ketua Komisi C DPRD Salatiga, Listyanto mengingatkan pelaksanaan proyek fisik dana APBD Perubahan 2021, batas waktunya 15 Desember 2021. "Awat, batas waktu pelaksanaan proyek fisik di Salatiga adalah 15 Desember 2021. Jangan sampai tidak selesai sesuai kontrak," tandas Listyanto kepada KR, Selasa (22/11). Pihaknya selaku komisi C yang membidangi pembangunan mengingatkan kepada para pelaksana untuk cekatan dan tangkas karena dikejar waktu. Demikian juga halnya dengan Walikota harus berani mengambil sikap tegas terhadap rekanan pelaksana yang terbukti tidak bisa menyelesaikan tepat waktu. "Walikota harus berani memberikan sanksi," katanya. Listyanto juga mengungkapkan proyek besar yang harus dipantau khusus karena nilainya besar, adalah Pembangunan Pasar Rejosari senilai kurang lebih Rp 23 miliar. Kemudian Taman Wisata Sejarah Salatiga (TWSS) kurang lebih Rp 9,3 miliar dan beberapa proyek lainnya nilainya di atas Rp 1 miliar. "OPD yang menjadi penanggung jawab, saya minta terus memantau jangan sampai molor dan menimbulkan masalah," katanya. Kepala DPUPR Salatiga, Suryadi Adi dihubungi KR terkait pernyataan Wakil Ketua Komisi C ini, melalui WA hanya mengatakan aman. (Sus)

Sertipikat Tanah Pemkab Boyolali Diserahkan

BOYOLALI (KR) - Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Boyolali, menyerahkan sertipikat aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali. Penyerahan sertipikat dilakukan secara langsung oleh Kepala Kantah Kabupaten Boyolali Priyanto kepada Bupati Boyolali M Said Hidayat di Ruang Merbabu Kantor Bupati Boyolali, Senin (22/11).

Pensertipikatan tanah tersebut dilakukan dalam rangka tertib administrasi dan pengamanan aset Pemkab Boyolali secara legal. "Target untuk legalisasi aset itu ada 685 bidang. Sertipikat yang sudah jadi 640," kata Priyanto.

Dijelaskan Pemkab Boyolali memiliki aset sejumlah 685, dari jumlah tersebut sebanyak 550 sudah diserahkan dan 90 belum diserahkan, serta ada tiga sertipikat yang baru proses cetak.

Sisanya, yakni 42 aset milik Pemkab Boyolali mengalami overlapping atau penggandaan sertipikat sehingga masih dilakukan penelitian objek. Meski demikian, pihaknya mengapresiasi kinerja dan kerjasama jajaran Pemkab Boyolali dalam menyelesaikan sertipikat yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat Kota Susu.

"Saya yakin dan percaya Bupati dan segenap jajaran mainset sudah sangat luas jadi tidak ego sektoral namun untuk kepentingan bersama," ungkapnya.

Pemkab Boyolali menghibahkan dua unit kendaraan roda empat untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Said Hidayat berharap dengan adanya dua armada tersebut, dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat Kabupaten Boyolali. (M-2)

ANTISIPASI MEREBAKNYA DEMAM BERDARAH Dikaji Perlunya Pemeriksaan Jentik Nyamuk

MAGELANG (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang sedang mengkaji apakah diperlukan adanya pemeriksaan jentik-jentik nyamuk oleh tim Puskesmas-Puskesmas sebagai salah satu langkah antisipasi berjangkitnya Demam Berdarah (DB) di wilayah Kota Magelang, mengingat saat ini sudah memasuki masa pancaroba.

Demikian dikemukakan Walikota Magelang dr HM Nur Aziz SpPD K-GH kepada KR usai kegiatan "Ngopi Bareng Pak Wali" di Balai RW Tidar Sari Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, Rabu (24/11).

"Mungkin minggu-minggu ini," kata Walikota Magelang yang didampingi Wakil Walikota Magelang Drs HM M Mansyur MAG. Hingga saat ini, lanjutnya, kasus DB di wilayah Kota Magelang belum ada dan masih aman.

Diharapkan di wilayah Kota Magelang jangan sampai terjadi kasus DB, dan mudah-mudahan bisa ditahan.

Sementara itu kegiatan antisipasi munculnya kasus DB dilakukan Polres Magelang Kota, diantaranya dengan kegiatan fogging atau pengasapan nyamuk maupun lainnya. Fogging tidak hanya dilakukan di kantor atau markas komando (marko) seperti Kantor Polres Magelang Kota, tetapi juga dilakukan di polsek-polsek jajaran Polres Magelang Kota dan asrama polisi. Kegiatan fogging ini dilakukan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Magelang.

Hal ini dibenarkan Kapolres Magelang Kota AKBP Asep Mauludin SIK MH kepada KR secara terpisah di Polres Magelang Kota. Dikatakan, fogging atau pengasapan yang dilakukan tersebut sebagai upaya antisipasi dan pencegahan terjadinya

DB di lingkungan kantor dan asrama jajaran Polres Magelang Kota.

"Lebih awal lebih baik untuk melaksanakan fogging ini, agar jangan sampai anggota atau keluarga yang terjangkit demam berdarah," kata Kapolres Magelang Kota yang didampingi Waka Polres Magelang Kota Kom-

pol Supriyadi SH, Kasi Humas Polres Magelang Kota Iptu Suharto maupun lainnya.

Kegiatan ini juga ditindaklanjuti dengan aktivitas lainnya, di antaranya dengan kebersihan lingkungan, mengingat kebanyakan nyamuk dewasa yang mati akibat fogging tersebut. Dikata-

kan, pada saat Apel Jam Pimpinan juga sudah mengingatkan kembali kepada para anggota mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Smoking corner juga sudah disediakan di sekitar Kantor Polres Magelang Kota, sehingga merokok tidak di sembarang lokasi. (Tha)



Petugas melakukan fogging atau pengasapan.

KR-Thoha

Polemik Berakhir, Bangun Hotel Tanpa Gusur Sekolah

PURWOREJO (KR) - Polemik pembangunan hotel berbintang di kawasan Hotel Ganesha yang memunculkan wacana penggusuran SDN Seboenggangan Purworejo, berakhir.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo tidak akan mengusur sebelum SD pengganti selesai dibangun pada tahun 2024.

Kendati demikian, pembangunan hotel akan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. "Pemkab akan membangun gedung sekolah di lokasi baru sebagai pengganti SDN Seboenggangan yang sekarang ini berdiri di kawasan sekitar hotel," kata Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiyabudi, Rabu (24/11).

Kesimpulan itu didapat dalam

musyawarah antara Sekretaris Daerah (Sekda) Purworejo, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Purworejo, sekolah, wali murid, dengan difasilitasi DPRD Purworejo. Sebelumnya, DPRD Purworejo juga mengundang Dinas PUPR Purworejo untuk mengadakan pertemuan membahas polemik SD tersebut. Dijelaskan, SDN Seboenggangan tetap akan menempati lokasi semula hingga tahun 2024. Pemkab direncanakan mulai membangun gedung sekolah baru pada tahun 2023.

Gedung baru itu rencananya akan didirikan di lahan kompleks SDN Kepatihan Purworejo. "Pemkab berencana membangun gedung representatif yang kelak akan dipakai siswa SDN Kepatihan dan Seboenggangan. Akan tetapi bangunan ruang kelas dan sarana lainnya tetap terpisah untuk masing-masing SD," terangnya.

Dion berharap kesepakatan tersebut menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan polemik agar tidak terus berlarut-larut. "Saya kira ini solusi terbaik dan dinas berkoordinasi surat pemberitahuan kepada pihak sekolah, agar tidak muncul disinformasi di masyarakat," tegasnya.

Terpisah, Komite Sekolah SDN Seboenggangan Sugeng Riyadi Widodo menuturkan, para orang tua dan wali menanggapi positif adanya jalan tengah untuk menyelesaikan polemik itu. Menurutnya, pembangunan gedung baru sebagai pengganti SDN Seboenggangan yang terkena dampak pembangunan hotel, menjadi harapan wali murid. "Nota kesepahaman antara pihak sekolah dengan dinas, dengan difasilitasi DPRD sudah dilakukan. Harapannya anak-anak kami tetap bisa bersekolah di SDN Seboenggangan tanpa memikirkan gangguan akibat pembangunan, dan anak-anak siap pindah ke gedung baru pada tahun 2024 mendatang," tandasnya. (Jas)

RISET PEMULIHAN DIIMPLEMENTASIKAN DI KARIMUNJAWA Teripang Bisa Dimanfaatkan untuk Kosmetik dan Farmasi

JEPARA (KR) - Pemanfaatan sumber daya teripang yang sementara ini hanya untuk konsumsi bisa dikembangkan lebih lanjut sebagai bahan baku industri farmasi dan kosmetik melalui pemanfaatan sumber daya menuju hilirisasi.

Dengan demikian akan mempunyai nilai lebih dan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat sekitarnya.

Research institute for Fish Enhancement and Conversion Agency of Research Development and Marine Dra Adriani Sri Nastuti MS mengemukakan hal tersebut ketika melakukan workshop, sosialisasi hasil riset dan buku petunjuk teknis pemulihan sumber daya teripang di Karimunjawa, baru-baru ini.

Kegiatan diikuti 52 peserta di antaranya Kepala Balai Riset Pemulihan Sumberdaya Ikan, Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jepara, Pejabat Tinggi Desa Kemujan dan Desa Karimunjawa.

Selain itu, juga diikuti kelompok nelayan teripang dan ikan, peneliti BRPSDI Jatiluhur Dr Ir Bambang Sulardiono MSi, staf Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro dan dibuka Kepala BRPSDI Ir Iswari Ratna Astuti. Sumber daya teripang dapat dilakukan serta pengelolaannya agar ketersediaan teripang dapat berkesinambungan.

"Keberhasilan riset pemulihan sumberdaya teripang akan diimplementasikan di beberapa wilayah perairan Karimunjawa dengan bantuan dana dari Desa Kemujan yang akan dilakukan pada tahun 2022," tandasnya.

Menurut Sri Nastiti, buku petunjuk teknis yang disampaikan adalah pedoman bagi nelayan dan peragant desa setempat bagaimanapun tahapan pemulihan.

Disebutkan, populasi teripang menurun pada hampir seluruh perairan di Indonesia, bahkan untuk jenis yang bernilai ekonomis tinggi sudah punah seperti jenis teripang pasir di perairan Taman Nasional Kepulauan Seribu, perairan Taman Nasional Karimunjawa dan perairan lainnya.

Turunnya populasi teripang pasir ini menurut Adriani Sri Nastiti, karena tingkat pemanfaatan berlebih, yaitu laju eksploitasi melebihi laju reproduksi.

"Untuk mencapai ukuran matang gonad dari fase juvenil membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. Untuk itu diperlukan regulasi penangkapan yang mengatur ukuran berapa yang boleh ditangkap, yaitu ukuran sudah matang gonad antara 300-400 gram yang diharapkan sudah pernah memi-

ju. Ukuran yang tidak boleh ditangkap adalah ukuran juvenil pada kisaran 20 gram per ekor dan ukuran induk yaitu lebih dari 500 gram per ekor," jelasnya.

Demikian juga dengan waktu penangkapan, hendaknya dibatasi jumlah upaya penangkapan pada saat bulan gelap dimana terlihat teripang melimpah.

"Perikanan teripang di Karimunjawa adalah perikanan ekspor berbasis penangkapan. Selama ini

pengelolaan teripang secara berkelanjutan masih sulit dilakukan," tambahnya.

Untuk itu agar ketersediaan teripang tetap berkelanjutan, maka perikanan teripang harus dikelola dengan pendekatan masyarakat, yang disertai dengan penguatan kelembagaan dan regulasi pemanfaatan. Tentu dalam hal ini sebut Nastiti, dibutuhkan dukungan dan partisipasi penuh masyarakat dalam banyak hal. (Fsy)



Tim riset teripang.

KR-Istimewa

SELAMAT & SUKSES
Hari Guru Nasional 2021

"Bangkit Guruku. Maju Negeriku. Indonesia Tangguh. Indonesia Tumbuh"

H. TRIYONO, S.Pd., M.M. WAKIL KETUA DPRD
HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I.Kom. KETUA DPRD
MARJUKI, SIP. WAKIL KETUA DPRD
H. HARIYANTO, S.Pd. WAKIL KETUA DPRD

Netizen Dair 2021 Dapat Perhatian Generasi Milenial



SEMARANG (KR) - Gelaran Netizen Fair oleh Kementerian Kominfo mendapat perhatian dari generasi milenial Semarang dan sekitarnya. Pada kegiatan yang digelar 2 hari, Selasa (23/11) dan Rabu (24/11) sekitar 500 kaum milenial mengikuti acara dengan seksama.

Raisa (20) mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di Semarang di sela kegiatan Rabu (24/11) mengaku senang mengikuti kegiatan yang digagas dan diselenggarakan Kementerian Kominfo.

"saya jadi paham tentang bagaimana pemanfaatan media sosial. Ternyata ada banyak hal yang diperhatikan, termasuk ada etikanya agar kita tidak melanggar hukum dan melanggar hak-hak publik, maupun pribadi," ungkap Raisa.

Hal sama juga diungkapkan Devi (24), ternyata penguasaan media sosial secara tepat dan benar

justu menurut Devi bisa untuk mendukung pengembangan berbagai sektor, ternyata industri kreatif kaum milenial. Wakil Walikota Semarang, Hj Ir Hevearita G Gunaryanti MSos yang hadir di tengah ratusan kaum milenial merasa bangga dan senang menyaksikan antusias warga Semarang yang menghadiri gelaran Nitizen fair 2021.

Dirinya berharap agar generasi milenial makin cakap dan cerdas bisa memanfaatkan Media Sosial untuk mengaktualisasikan diri, bukan justru untuk hal-hal yang bersifat merugikan orang lain bahkan diri sendiri. Mbak Ita, panggilan akrab Hevearita membenarkan bahwa sekarang ada istilah "Jarimu adalah Harimaumu." Akibat mirisnya literasi tentang pemanfaatan media sosial, jari kita bisa menjadi harimaumu yang menerkam diri sendiri. Apalagi sekarang sudah

ada UU ITE, kalau tidak paham bisa masuk dalam pelanggaran undang-undang dan bisa berbuntut pidana," ujar Ita.

Karenanya, Ita sangat mendukung literasi tentang pemanfaatan media sosial perlu terus dilakukan untuk mencerdaskan generasi milenial yang pasti akan berkembang dalam teknologi dunia maya yang semakin berkembang.

Kepala Diskominfo Kota Semarang Dr Bambang Pramusito SH SIP MSI selaku salah satu pembicara memandag perlunya literasi digital bagi generasi milenial agar semakin bijak dalam mengelola dunia digital. "TIK bisa jadi Core Bisnis dan menjadi faktor pembantu untuk mendapatkan dan mengelola informasi. Namun bila salah kelola bisa menjadi faktor pembunuh karakter. Selain itu, kegapangan dalam pengetahuan digital, bisa saja memudahkan kita semua sebagai korban cybercrime," ungkap Bambang.

Oleh karena itu Bambang berharap generasi milenial juga paham tentang Teknologi Keamanan Informasi. Dia berharap UU Perlindungan Data Pribadi yang kini sedang digodog segera selesai sehingga bisa melindungi masyarakat dari kejahatan digital, (Cha/Bdi)



KR-Chandra AN

Kadiskominfo Kota Semarang Dr Bambang Pramusito mengajak generasi milenial cakap memanfaatkan teknologi digital.